

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA

*The Effect of Regional Original Revenue to Regional Expenditures
in Manado City North Sulawesi*

Imanuel M.H. Sumakul, Theodora M. Katiandagho, dan Melissa L.G. Tarore
Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi

ABSTRACT

The objective of this study is to analyze the Effect of Regional Original Revenue on Regional Expenditures in Manado City North Sulawesi Province. The variables to be analyzed are regional original revenue (PAD) and Regional Expenditures from 2000-2017. This research was conducted in June to December 2019, from preparation to report preparation. Secondary data used obtained from relevant agencies, the statistical center of Manado City. Secondary data collected from Regional Original Revenue (PAD) and Regional Expenditures with time series data for 18 years. The method of data analysis is done using simple Regression Analysis. The research results showed that the Regional Original Revenue has a positive and significant effect on Regional Expenditure in the Manado City, North Sulawesi Province.

Keywords: *Effect of local original revenue, local expenditure*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah memberikan informasi yang transparan dan akuntabel Bastian, (2006:2).

Keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah sangat bergantung pada kemampuan membiayai kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam wewenang. Sebagai konsekuensi didalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah kabupaten dituntut untuk mampu membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya. Hal ini menandakan bahwa daerah harus berusaha untuk mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan tolok ukur bagi daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat Panggabean, (2009).

Pendapatan Asli Daerah sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena dana ini adalah milik pemerintah daerah sendiri sehingga pemerintah daerah mempunyai

wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut. Di lain pihak pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap pengelolaan keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, karena dana itu berasal dari masyarakat daerah setempat yang berhak untuk mendapatkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya (Rindu, 2012). Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Manado dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Di mulai Pada tahun 2000 Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan Rp14.069.960milyar, di Tahun 2001 Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan (59,67%), di tahun 2002 mengalami kenaikan sebesar (21,29%) dan terus berlanjut samapi di tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp (10,61%), kemudian di tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp (44,86%) milyar, lalu di tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar (15,1 %) dan berlanjut di tahun 2017 dengan nilai pendapatan asli daerah yaitu sebesar 306.767.257 milyar (-2,5%).

Untuk mengetahui seberapa besar kewenangan daerah dalam menggali dan menggunakan sumber-sumber ekonomi di daerah guna membiayai kegiatan pembangunan melalui sumber-sumber keuangan asli daerahnya, ukuran yang digunakan untuk menentukan tolok ukur ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada faktor Pengeluaran atau Belanja Daerah. Belanja Daerah Kota Manado juga terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya itu kita bisa lihat dari pertumbuhan (%) dimana pada tahun 2001 mengalami pertumbuhan sebesar (133,39%), tahun 2003 dengan pertumbuhan (27,68%) , tahun 2006 dengan pertumbuhan (46,13%), dan terus berlanjut pada tahun 2011 dengan pertumbuhan (27,72%), lau berlanjut pada tahun 2013 dengan pertumbuhan (49,42%), pada tahun 2015 dengan pertumbuhan (47,8%) , dan pada tahun

2016 dengan pertumbuhan (36,07%). Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bergulirnya otonomi daerah yang, pemerintah Kota Manado diharapkan dapat meningkatkan potensi daerahnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerahnya. Dengan meningkatnya pendapatan daerah, secara otomatis pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga meningkat. Melalui otonomi daerah, pemerintah Kota manado diharapkan dapat menggali potensi-potensi daerah yang ada. Pemerintah Kota Manado sangat berperan penting dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dalam hal menggali potensi daerahnya. Sehingga pendapatan daerah yang meningkat dapat digunakan untuk belanja daerah secara langsung maupun tidak langsung. Sesuai dengan latar belakang masalah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik menggali potensi daerah Kabupaten Kota Manado. Penelitian ini berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2000-2017.

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Kota Manado tahun 2000-2017.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini telah dilakukan selama 6 bulan yaitu sejak bulan Juni - Desember tahun 2019 dengan lokasi Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Data yang di gunakan pada penelitian ini bersifat Kuantitatif merupakan data time series dari tahun 2000-2017. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dari instansi terkait yaitu : Badan Pusat Statistik (BPS)

Kota Manado. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua variabel yang tersusun atas satu variabel terkait (Dependent Variable) dan satu variabel bebas (Independent Variable). Variable terkait dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah, sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini adalah PAD (pendapatan asli daerah) Kota Manado.

Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah, penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana yaitu untuk mengetahui hubungan secara linear antara satu variabel independen dengan variabel dependen. Secara matematis model persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$B_{Di} = a + b \text{ PAD}_i$$

Dimana:

B_{Di} = Belanja Daerah Tahun ke i

PAD_i = Pendapatan Asli Daerah Tahun ke i

a = konstanta (rata-rata umum)

b = koefisien variabel PAD

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Daerah Penelitian

Kota Manado adalah ibu kota dari provinsi Sulawesi Utara dan Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Manado Memiliki Batas-Batas yaitu: Utara Kabupaten Minahasa Utara, Selatan Kabupaten Minahasa, Timur Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Minahasa, Barat Laut Sulawesi. Kota Manado memiliki jumlah penduduk yang pada tiap tahunnya mengalami peningkatan. Terkait dengan jumlah penduduk yang tinggi tentunya terdapat faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah tingkat atau laju pertumbuhan penduduk, besarnya laju pertumbuhan penduduk membuat pertambahan jumlah penduduk semakin meningkat. Semakin besar presentase kenikannya maka semakin besar jumlah penduduknya. Semakin tingginya rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun, otomatis akan meningkatkan jumlah penduduk secara

pesat. Jumlah penduduk Kota Manado pada enam tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.

Pada Tabel 1 Kota Manado terdiri dari 11 Kecamatan dan 87 kelurahan yakni: Kecamatan Malalayang dengan 9 kelurahan, Kecamatan Sario dengan 7 kelurahan, Kecamatan Wanea dengan 9 kelurahan, Kecamatan Wenang dengan 12 kelurahan, Kecamatan Tikala dengan 5 kelurahan, Kecamatan Pall Dua dengan 7 kelurahan, Kecamatan Mapanget dengan 10 kelurahan, Kecamatan Singkil dengan 9 kelurahan, Kecamatan Tuminting dengan 10 kelurahan, Kecamatan Bunaken dengan 5 kelurahan, dan Kecamatan Bunaken Kepulauan dengan 4 kelurahan.

Jumlah penduduk Kota Manado dari tahun 2012-2017 terus mengalami peningkatan tetapi relatif stabil, bisa dilihat bahwa jumlah penduduk Kota Manado pada tahun 2012 menurut Badan Pusat Statistik berjumlah 417 483 jiwa sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar (0,50%) atau berjumlah 419 596 jiwa, terus berlanjut pada tahun 2014 dengan mengalami pertumbuhan sebesar (0,87%) atau berjumlah 423 257 jiwa, pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar (0,56%) atau berjumlah 425 634 jiwa, dan masih terus berlanjut pada tahun 2016 dengan pertumbuhan sebesar (0,53%) atau berjumlah 427.906, dan di tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar (0,52%) atau berjumlah 430.133 jiwa. Besarnya jumlah penduduk di Kota Manado menyebabkan kepadatan penduduk menjadi cukup tinggi. Rasio jenis kelamin penduduk Kota Manado berada diatas angka 100 yaitu sebesar 100,72 persen. Hal ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kota Manado saat ini lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan berbanding lurus dengan kondisi tahun sebelumnya dimana jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dari jumlah penduduk.

Tabel 1 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kota Manado, 2012-2017

No	Kecamatan	Kelurahan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Malalayang	9	56.352	56.940	56.799	57.215	57.319	58.146
2	Sario	7	23.206	23.035	24.549	24.616	24.456	24.277
3	Wanea	9	57.036	56.724	56.213	56.506	56.509	56.879
4	Wenang	12	32.658	31.872	36.177	36.249	36.031	35.882
5	Tikala	5	28.718	29.135	29.348	29.431	29.693	29.604
6	Paal Dua	7	42.062	42.629	41.970	42.087	42.488	42.496
7	Mapanget	10	50.146	52.174	51.631	52.233	53.716	54.063
8	Singkil	9	47.050	47.308	48.039	48.167	48.248	48.317
9	Tuminting	10	51.982	52.053	51.410	51.773	51.539	52.692
10	Bunaken	5	21.108	21.943	20.977	21.196	21.740	21.675
11	Bunaken Kepulauan	4	5.700	5.783	6.144	6.161	6.167	6.102
	Jumlah	87	417.483	419.596	423.257	425.634	427.906	430.133

Sumber: BPS Kota Manado, 2019

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku menurut lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel 2.

Pada tabel 2 terlihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto dari tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan, bisa dilihat pada tahun 2014 PDRB kota manado bernilai 22.49 triliun, dan pada tahun 2016 berjumlah 28.33 triliun, dan terus meningkat

sampai pada tahun 2017 dengan jumlah 31.33 triliun. Dari Produk Domestik Regional Bruto atas harga berlaku, ada beberapa sektor yang mempunyai kontribusi paling banyak diantara sektor-sektor lainnya, yaitu: Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, ada juga sektor transportasi dan pergudangan, ada juga di sektor konstruksi dan yang terakhir sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Selain itu ada juga sektor yang paling sedikit memberikan kontribusi yaitu sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, serta dari sektor pertambangan dan penggalian.

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kota Manado, 2013-2017

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	408.592,20	482.186,10	532.418,10	558.650,80	590.134,00
Pertambangan dan Penggalian	18.443,30	19.483,40	21.305,10	22.694,50	23.228,80
Industri Pengolahan	771.697,50	837.781,40	882.362,40	916.356,30	1.033.603,50
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.026,50	12.277,40	15.921,10	18.393,80	21.976,60
konstruksi	2.322.693,40	2.409.524,90	2.609.249,80	2.704.391,70	2.975.480,80
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.678.194,10	4.014.231,00	4.563.663,80	4.886.603,50	5.425.921,90
Transportasi dan Pergudangan	2.967.026,20	3.887.573,40	4.782.734,70	5.636.635,40	6.154.254,50
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.055.730,50	1.214.067,50	1.410.624,90	1.643.401,50	1.810.590,10
Informasi dan Komunikasi	1.980.705,20	2.152.639,10	2.461.831,10	2.725.461,10	3.065.795,80
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.663.147,60	1.780.255,80	1.939.544,00	2.332.691,00	2.601.201,70
Real Estat	503.710,50	579.638,80	636.185,10	678.774,60	743.201,70
Jasa perusahaan	41.926,50	49.261,20	56.885,20	64.135,60	74.966,20
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan sosial wajib	2.147.486,40	2.532.650,50	2.823.892,20	3.039.178,70	3.251.764,20
Jasa pendidikan	701.627,80	797.192,10	912.567,60	987.095,60	1.042.555,40
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	908.880,00	993.666,70	1.093.911,20	1.207.576,70	1.310.043,90
Jasa lainnya	678.098,60	713.309,70	787.444,80	883.342,70	981.870,80
Jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	19.876.986,90	22.497.603,50	25.554.774,20	28.331.189,00	31.133.345,90

Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah, Jika pembangunan dilakukan tepat sasaran maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan. Bila tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat maka pertumbuhan ekonomi daerah meningkat juga maka tingkat kesejahteraan masyarakat dan juga produktifitasnya pun semakin tinggi.

Suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat, yang menyebabkan kenaikan produksi barang dan jasa atau peningkatan pendapatan daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi dapat mengindikasikan keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat, sehingga penting untuk melakukan perhitungan pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Manado dari tahun 2000-2017 dapat dilihat pada Tabel 3.

Pada Tabel 3 terlihat pertumbuhan ekonomi Kota Manado pada tahun 2001 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2000, kemudian terus mengalami kenaikan sampai pada tahun 2000 pertumbuhan ekonomi Kota Manado berada di atas 6% dan terus meningkat sampai pada puncak pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu tahun 2009 dengan peningkatan sebesar 9,77% , laju pertumbuhan ini menjadi yang paling besar karena adanya 3 kegiatan yang berskala internasional di Kota Manado yaitu World Ocean Conference (WOC), Coral Triangle Initiatives, dan Sail Bunaken, kemudia pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 menurun drastis dari tahun 2013, hal itu juga disebabkan karena pada tahun itu terjadi banjir bandang di hampir seluruh Kota Manado dan otomatis berdampak pada pertumbuhan ekonomi, kemudian pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 7,19% dan kembali turun pada tahun 2017 dengan pertumbuhan sebesar 6,75%.

Tabel 3. Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado Tahun 2000-2017

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2000	5,99
2001	5,20
2002	5,09
2003	5,76
2004	5,45
2005	6,09
2006	6,67
2007	6,80
2008	6,80
2009	9,77
2010	7,30
2011	8,39
2012	8,71
2013	8,57
2014	6,68
2015	6,39
2016	7,19
2017	6,75

Sumber: BPS Kota Manado, 2019

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah Kota Manado

Kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran dijadikan dasar untuk mengoptimalkan penerimaan dari daerahnya sendiri yaitu melalui sektor PAD. Pemerintah Kota Manado sendiri terus berupaya untuk mengelola potensi pemasukan keuangan daerah melalui sumber-sumber penerimaan daerah. Karena dengan adanya kegiatan pembangunan di daerah hal tersebut harus didukung oleh anggaran yang tersedia di daerah. PAD Kota Manado dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Tahun 2000-2017

Tahun	PAD (Milyar Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Tahun	PAD (Milyar Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2000	14.069.960		2009	74.854.540	1,86
2001	22.465.730	59,67	2010	90.828.484	21,33
2002	27.248.840	21,29	2011	134.721.723	48,32
2003	30.392.110	11,53	2012	149.019.275	10,61
2004	34.576.450	13,76	2013	215.871.043	44,86
2005	35.631.695	3,05	2014	263.392.316	22,1
2006	46.516.790	30,54	2015	282.525.557	7,26
2007	48.911.843	5,14	2016	344.955.423	22,09
2008	73.481.423	50,23	2017	306.767.257	-2,5

Sumber: BPS Kota Manado, 2019 (diolah)

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Manado dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Di mulai Pada tahun 2000 Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan 14.069.960 milyar, di Tahun 2001 Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan Rp 22.465.730 (59,67 %) milyar dan terus berlanjut samapi di tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp 149.019.275 (10,61%) milyar, kemudian di tahun 2013 pendapatan asli daerah (PAD) mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 215.871.043 (44,86%) milyar, lalu di tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp 248.480.328 milyar dan berlanjut di tahun 2017

dengan nilai pendapatan asli daerah yaitu sebesar 306.767.257 milyar. Perkembangan pendapatan asli daerah Kota Manado memang terus meningkat dari tahun ke tahun namun tentunya kita juga perlu melihat bahwa didalam suatu pendapatan pasti akan ada pengeluaran atau belanja yang menjadi tolok ukur dalam suatu pendapatan. Belanja Daerah Kota Manado tahun 2000-2017 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Belanja Daerah Kota Manado Tahun 2000-2017

Tahun	Belanja Daerah (Miliyar Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Tahun	Belanja Daerah (Miliyar rupiah)	Pertumbuhan (%)
2000	70.467.264		2009	701.520.877	4,38
2001	164.470.560	133,39	2010	702.335.965	0,11
2002	201.564.285	22,55	2011	897.064.922	27,72
2003	257.372.840	27,68	2012	881.641.142	-1,78
2004	285.142.970	10,78	2013	1.317.428.809	49,42
2005	311.669.085	9,3	2014	1.000.640.514	-24,04
2006	455.452.840	46,13	2015	1.478.996.031	47,8
2007	558.031.620	22,52	2016	2.012.552.367	36,07
2008	672.057.075	20,43	2017	1.682.972.037	-16,37

Sumber: BPS Kota Manado, 2019

Berdasarkan PAD dan Belanja Daerah Kota Manado tahun 2000-2017 dilihat dari kontribusi PAD terhadap belanja daerah di Kota Manado masih relatif rendah, hal ini menandakan masih adanya ketergantungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal kemandirian tentunya masih belum bisa dikatakan mandiri karena proporsinya atau pembiayaan pembangunan

terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Secara otomatis ketergantungan ini dapat menyebabkan diahlikannya fungsi-fungsi pemerintah daerah ke tingkat pemerintahan yang lebih di atas. Untuk mengetahui secara jelas tentang kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah Di Kota Manado

Tahun	Belanja Daerah (Miliyar Rupiah)	PAD (Miliyar Rupiah)	Kontribusi (%)
2000	70.467.264	14.069.960	19,96
2001	164.470.560	22.465.730	13,65
2002	201.564.285	27.248.840	13,51
2003	257.372.840	30.392.110	11,80
2004	285.142.970	34.576.450	12,12
2005	311.669.085	35.631.695	11,43
2006	455.452.840	46.516.790	10,21
2007	558.031.620	48.911.843	8,76
2008	672.057.075	73.481.423	10,93
2009	701.520.877	74.854.540	10,67
2010	702.335.965	90.828.484	12,93
2011	897.064.922	134.721.723	15,01
2012	881.641.142	149.019.275	16,90
2013	1.317.428.809	215.871.043	16,38
2014	1.000.640.514	248.480.328	24,83
2015	1.478.996.031	282.525.558	19,10
2016	2.012.552.367	314.634.922	15,63
2017	1.682.972.037	306.767.257	18,22

Sumber: BPS Kota Manado, 2019 (diolah)

Dalam data pada Tabel 6 menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah di Kota Manado masih sangat rendah, karena pada dasarnya otonomi daerah itu sendiri adalah suatu daerah yang dapat mengurus rumah tangganya sendiri termasuk di sektor keuangan yang harus memiliki sumber-sumber keuangan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah itu sendiri. Kemudian bisa dilihat presentase dari PAD itu sendiri terhadap Belanja Daerah di Kota Manado masih kurang yaitu rata-rata masih dibawah 20%, hanya pada tahun 2014 yang presentasinya naik menjadi 24% Selain itu kita bisa melihat bahwa presentase di tahun-tahun yang lain mengalami peningkatan dan penurunan sama seperti di tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2015-2017. Hal itu terjadi karna kurangnya pemerintah Kota Manado dalam memanfaatkan hasil atu sumber-sumber pendapatan yang ada di kota itu sendiri. Karena kurangnya kontribusi PAD terhadap dari tiap-tiap daerah, karena semakin besar potensi daerah tersebut maka semakin besar dana perimbangan yang akan diberikan untuk membantu PAD dalam membiayai Belanja Daerah di

Belanja Daerah di Kota Manado maka pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk memberikan bantuan dalam keuangan pemerintah daerah yaitu dana perimbangan. Dana perimbangan menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 yaitu dana transfer dari pemerintah pusat berupa Dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus dan dana bagi hasil yang digunakan untuk kewenangan pemerintah daerah Kota Manado. Dana bagi hasil digunakan untuk penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak yang dibagihasilkan, DAU berperan sebagai pemerataan fiskal antar daerah di seluruh indonesia, sedangkan DAK berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat. Dan dari ketiga dana tersebut semuanya diserahkan ke pemerintah Kota Manado. Dana perimbangan ini diberikan kepada pemerintah daerah sesuai kebutuhan masing-masing di tiap pemerintah daerah dan berbeda Kota Manado. Dana perimbangan beserta unsur-unsurnya dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Dana Perimbangan Kota Manado Tahun 2000-2017

Tahun	Dana Perimbangan	Pos Bagi Hasil Pajak	Pos Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	Pos Dana Alokasi Umum	Pos Dana Alokasi Khusus	Bagi Hasil Provinsi
2000	56,66	4,89	0,00	36,91	14,86	
2001	395.606,11	39.685,98	159.486,59	196.433,54	0,00	
2002	175.632,18	24.779,32	4.629,09	142.153,44	4.070,35	11.382,00
2003	233.299,80	28.632,83	3.536,24	194.620,42	6.510,32	
2004	230.942.450	26.594.750	359.940	183.903.000	9.480.000	10.605.210
2005	249.981.700	28.215.334	496.846	201.530.000	8.260.000	11.479.520
2006	402.459.040	20.599.114	1.67.066	330.290.000	31.800.000	18.082.860
2007	433.659.840	36.634.681	1.372.659	374.754.000	30.898.500	
2008	514.781.085	41.733.479	233.337	430.073.269	42.741.000	
2009	520.698.963	44.017.288	247.112	420.752.563	55.682.000	
2010	509.243.124	60.522.550	224.863	420.481.311	28.014.400	
2011	574.504.145	48.998.938	348.869	482.198.138	42.958.200	
2012	667.121.867	45.532.532	370.523	576.989.312	44.229.500	
2013	757.043.192	56.443.476	1.043.916	647.565.931	51.989.255	
2014	813.013.594	34.184.855		729.213.779	49.614.960	
2015	926.967.599	29.042.967		750.810.852	147.113.780	
2016	1.031.123.897	51.092.250		1.950.731.731	237.093.306	
2017	1.036.141.852	52.318.408			242.835.835	

Sumber: BPS Kota Manado, 2019

Pada tabel 7 Dana Perimbangan tersebut yang paling dominan atau yang paling banyak menyumbang atau memberikan bantuan adalah DAU atau Dana Alokasi Umum. karena DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Analisis Regresi Sederhana

Berdasarkan Hasil olahan data menggunakan SPSS 23, nilai dimasukkan dalam model sehingga persamaan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$BDi = 155,766 + 5,043 \text{ PADI}$$

Dari persamaan diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 155,766, berarti bahwa jika Pendapatan asli daerah di kota manado bernilai nol, maka belanja daerah akan bernilai 155,766 milyar rupiah.
2. Koefisien Pendapatan asli daerah di Kota Manado bernilai 5,043, berarti bahwa setiap kenaikan satu milyar Pendapatan asli daerah di Kota Manado akan meningkatkan belanja daerah sebesar 5,043 milyar rupiah.

Dengan melihat hasil pengujian diatas menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Dalam mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri, pemerintah daerah diharapkan mampu mengali potensi-potensi atau sumber daya – sumber daya yang ada di daerah sendiri yang nantinya akan dijadikan sebagai sumber-sumber penerimaan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah yang tujuannya meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan publik. Pemerintah daerah pun harus sebaik mungkin

mengelola dana tersebut demi pembiayaan pengeluaran daerah.

Pemerintah Kota Manado sebaiknya lebih melakukan langkah-langkah yang konkrit dan signifikan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado tentu Pendapatan Daerah akan meningkat dikarenakan Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Daerah yang pada akhirnya juga akan diikuti dengan peningkatan Belanja Daerah yang akan berdampak pada kemakmuran rakyat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah maka ditarik kesimpulan yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan dengan Belanja Daerah Kota Manado.
2. Berdasarkan hasil olahan maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kota Manado.

Saran

1. Agar pendapatan asli daerah dapat terus meningkat maka pemerintah Kota Manado perlu juga meningkatkan usaha pada khususnya yang menjadi sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah secara aktif.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan jumlah populasi dan sampel dapat diperluas ke tingkat provinsi dan nasional sehingga hasilnya menjadi lebih baik dan juga dapat menambah variabel-variabel lain seperti penerimaan lain yang diduga dapat mempengaruhi Belanja Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Anonim Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Dana Perimbangan

Bastian, Indra. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta.

Rindu Datu K, Indra 2012. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Makassar Tahun 1999-2009 (Doctoral dissertation).